

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Globalisasi menjadikan para pelaku hubungan internasional semakin luas. Peningkatan teknologi komunikasi dan informasi juga meningkatkan terjadinya saling keterkaitan antar negara, yang menjadikan memudarnya batas negara (*borderless*). Karena memudarnya batasan antar negara itulah negara-negara semakin mudah untuk berhubungan satu sama lain sehingga muncul kebutuhan akan kerjasama yang menciptakan saling ketergantungan antar negara. Bergesernya dan meluasnya aktor negara menjadi aktor non negara merupakan dampak dari globalisasi. Negara bukan lagi aktor tunggal dalam hubungan internasional, melainkan aktor dalam dunia internasional semakin berkembang ke pelaku-pelaku lain seperti perusahaan internasional, lembaga swadaya masyarakat, individu, bahkan pemerintah daerah.

Aktor sub-state memiliki kepentingan untuk melaksanakan hubungan dan kerjasama dengan mitra mancanegara, dimana hal tersebut selaras dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat diberi kewenangan untuk membagi tugasnya kepada pemerintah daerah untuk dapat mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri. Melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa peluang pemerintah daerah ikut serta dalam berbagai kerjasama seperti kerjasama daerah dengan daerah lain (KSDD), kerjasama daerah dengan pihak ketiga (KSDPK), maupun kerjasama dengan pemerintah daerah atau

daerah di luar negeri (KSDPL/KSDLL) untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah. Meskipun actor sub-state bisa menjalin kerjasama dengan daerah lain di dalam dan diluar negeri, kebijakan luar negeri yang menyertakan pemerintah daerah harus menggunakan kebijakan satu pintu (Kemlu, 2019). Dimana semua interaksi internasional yang dilakukan termasuk oleh pemda harus dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Kementerian Luar Negeri.

Salah satu kerjasama pemerintah daerah berbentuk kota/provinsi kembar. Sister city/province adalah suatu rancangan pengabungan dua kota atau provinsi yang letak serta manajemen politiknya berbeda, dimana bertujuan untuk mempererat hubungan budaya dan komunikasi antar penduduk (Sinaga, 2010). Kerjasama kota/provinsi kembar membuktikan adanya akibat dari globalisasi menimbulkan pertumbuhan cepat khususnya melahirkan berbagai macam kerjasama di dunia. Munculnya berbagai macam kerjasama ini di dorong karena adanya kepahaman bahwa negara tidak dapat mengantungkan kebutuhannya hanya pada potensi yang ada di negaranya, namun untuk dapat memenuhi kebutuhannya negara dapat menjalin kerjasama. Hubungan sister city/province diibaratkan seperti saudara kandung di dua negara yang saling terikat, terus berkembang, dan saling menguntungkan satu sama lain. Kerjasama *Sister province* merujuk pada Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Kerjasama yang menggunakan actor non-negara seperti kerjasama sister city/province adalah wujud dari diplomasi modern karena adanya pengaruh globalisasi menjadikan actor diplomasi mengalami perluasan dan perkembangan

sehingga tidak hanya actor negara saja melainkan actor sub-nasional atau non negara yang melaksanakan kegiatan diplomasi. Diplomasi dikategorikan kedalam tiga bentuk yaitu, *track one diplomacy*, *track two diplomacy*, dan *multi track diplomacy*. Bentuk *track one diplomacy* merupakan bentuk diplomasi tradisional dimana dalam prosesnya lebih melibatkan para pemimpin politik, dimana fokusnya pada perundingan damai, perjanjian hingga gencatan senjata, diplomasi ini menenkankan hubungan negara dengan negara. *Track two diplomacy* merupakan diplomasi yang dilakukan oleh actor non pemerintah atau profesional untuk mencegah adanya konflik sehingga tercipta perdamaian. Sedangkan, bentuk diplomasi modern dengan actor non-negara termasuk dalam kategori *multi track diplomacy* (McDonald, 2003). Dimana diplomasi dapat dilakukan oleh berbagai actor dalam dalam sistem internasional, baik non-negara seperti individu atau kelompok masyarakat, negara dan juga sub-negara.

Indonesia memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) produktif yang melimpah pada tahun 2020-2030. Adanya bonus demografi atau ledakan penduduk sama dengan adanya rintangan akan susahnyanya kompetisi kerja yang semakin terbuka. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana negara memiliki angkatan kerja yang lebih banyak daripada bukan angkatan kerja (Jati, 2015). Bonus demografi dapat bermanfaat mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen yang baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Ledakan penduduk ini dapat berdampak positif maupun negatif, dengan banyaknya angkatan kerja maka lapangan pekerjaan yang dibuka juga harus banyak. Jika jumlah lapangan kerja sedikit maka akan menimbulkan naiknya angka pengangguran. Hal inilah salah satu

dampak negatif demografi. Tingginya angka pengangguran akan mengakibatkan tumbuhnya angka kemiskinan dan juga memicu untuk melakukan tindak kejahatan. Dengan adanya ledakan penduduk tersebut maka pemerintah harus menata dengan sebaik mungkin penduduk angkatan kerja agar betul-betul produktif, memiliki pekerjaan yang menghasilkan.

Dengan demikian, perlu adanya persiapan untuk menyambut puncak bonus demografi, salah satunya yaitu dengan mengembangkan SDM, dimana SDM merupakan modal besar untuk melakukan pembangunan. Agar SDM Indonesia menjadi masyarakat yang kreatif, berkualitas, mampu memecahkan masalah dilingkup individu maupun sosial serta dapat membekali diri dengan ilmu kewirausahaan agar kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat karena terbukanya lapangan pekerjaan. Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama berupaya keras menyiapkan masyarakat untuk menyongsong puncak bonus demografi tahun 2030 mendatang. Sejalan dengan hal tersebut maka, pada Juli 2019 Provinsi Jawa Tengah dan Queensland kembali melanjutkan kerjasama yang sudah berakhir tahun 2018 lalu (jateng.com, 2019).

Perpanjangan kerjasama ini yang telah berjalan selama 28 tahun berfokus untuk mempertajam pada beberapa bidang seperti, pengembangan ekonomi berdasar pada masyarakat (UMKM), Kebudayaan, Pariwisata, serta pengembangan fasilitas layanan kesehatan, dan mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu yang menjadi tujuan utama atau fokus dari perpanjangan kerjasama ini dikarenakan kerjasama dilakukan untuk membantu pemerintah Jawa

tengah melakukan pengembangan terhadap SDM, dimana pengembangan SDM dilakukan melalui pendidikan.

Peningkatan kualitas SDM dapat dicapai melalui pendidikan, melalui pendidikan setiap individu akan mendapatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang nantinya dapat digunakan di dunia kerja. Dalam hal ini pemerintah memandang bahwa pendidikan vokasi mampu dan sebagai pendidikan yang memang dirancang untuk meningkatkan keahlian, kepandaian, dan kapabilitas kerja dimana memiliki posisi strategis untuk menghasilkan individu yang nantinya memiliki kompetensi dan kualitas yang sesuai dengan keperluan industri yang tidak bisa dilakukan oleh pendidikan umum. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 pasal 15 Tahun 2003 tentang Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan untuk membentuk siswanya untuk dapat bekerja di bidang tertentu (Susanto, 2017). Walaupun pendidikan vokasi berkontribusi menciptakan individu yang berkualitas, pendidikan vokasi masih memiliki beragam persoalan, salah satunya adalah masih rendahnya mutu pendidikan di Jawa Tengah.

Adanya permasalahan tersebut dikarenakan belum maksimalnya sistem pengajaran oleh guru di sekolah. Dilihat dari pengukuran mutu pendidikan melalui standar nasional pendidikan (SNP) yaitu dari 8 standar yang ada, kualitas pendidikan pada tingkatan pendidikan dasar dan menengah di Jawa Tengah berada pada level 4 dari 5 level yang ada dengan skor SNP sebesar 94,25%. Dimana dengan skor tersebut terdapat dua standar yang nilai capaiannya masih rendah dibandingkan dengan standar lainnya yaitu standar pendidik yang baru mencapai 89% dan standar sarana dan prasarana yang mencapai 90% (Hesty Laily

Anggraeny, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki permasalahan pada rendahnya kualitas guru dan peralatan praktik yang sudah usang untuk praktik di sekolah.

Dari latar belakang diatas, penulis akan melihat efektivitas program implementasi kerjasama *sister province* yang telah terjalin antar kedua wilayah tersebut. Kerjasama pengembangan kapasitas dan kualitas SDM dilakukan melalui pendidikan khususnya pendidikan vokasi, dimana melalui kerjasama *sister province* ini memiliki program pelatihan bagi guru SMK di Jawa Tengah. Penulis belum melihat ada penelitian yang mendalam terkait kerjasama *sister province* dalam bidang pendidikan vokasi untuk mengembangkan SDM.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Seperti yang sudah diketahui pada latar belakang diatas, terkait perpanjangan dan pengembangan kerjasama *sister province* antara Jawa Tengah dengan Queensland yang fokus pada penelitian ini hanya pada pengembangan kualitas SDM. Untuk mengembangkan SDM maka harus menyelesaikan masalah yang ada pada cara guru pendidikan vokasi di Jawa Tengah dengan menetapkan program kegiatan, maka menimbulkan pertanyaan untuk penelitian ini yaitu “Bagaimana efektivitas program pada peningkatan kerjasama *sister province* Jawa Tengah dengan Queensland dalam bidang pendidikan vokasi?”

## **1.3. Tinjauan Pustaka**

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai kerjasama *Sister province* yang membahas mengenai implementasi kerjasama *Sister province*.

Beberapa penelitian terdahulu yaitu pertama, dalam penelitian Karamy (2020) yang berjudul Fashion Diplomasi Jawa Barat ke Australia Selatan: Kerjasama Model *Sister province* membahas tentang implementasi kerjasama *Sister province* di bidang seni dan budaya dimana merupakan kerjasama *fashion show* antara sekolah fashion muslim pertama di Indonesia IFI dengan sekolah kejuruan terbesar di Australia TAFE, bertujuan untuk mendorong inovasi di bidang fashion muslim dan Indonesia mendapatkan keuntungan ekonomi dari kerjasama industry fashion muslim. Pada penelitian ini menggunakan cara penelitian kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan menggunakan teori paradiplomasi dan konsep sister city/province.

Kedua, dalam penelitian Pestari (2020) yang membahas mengenai implementasi kerjasama *Sister province* dalam mengembangkan daerah pedesaan Sumbermulyo, Bantul yang merupakan desa unik penghasil beras terbesar di Yogyakarta dan sebagai desa wisata religi. Metode penelitiannya menggunakan 4 indikator model kebijakan implementasi Edward III.

Ketiga, pada penelitian Windiani (2014) yang membahas tentang efektivitas program kerjasama *Sister province* antara Jawa Tengah-Queensland dalam bidang pertanian dan menganalisis prospek program kerjasama *Sister province* di bidang pertanian. Metode penelitiannya menggunakan 4 indikator model implementasi Edward III dan menggunakan teori efektivitas organisasi Richard Steers. Ketiga penelitian tersebut merujuk atau membahas mengenai analisis implementasi kerjasama dan efektivitas implementasi di bidang seni dan budaya, pengembangan desa, dan pertanian yang semua bertujuan pada keuntungan dan pengembangan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, penelitian–penelitian yang terkait *Sister province* yang lain lebih banyak membahas tentang kerjasama agar meningkatkan jumlah wisatawan di bidang pariwisata, kerjasama untuk mengidentifikasi faktor-faktor seperti faktor pengoptimalkan peran pemerintah, faktor utama kegagalan kerjasama, faktor pendorong dan penghambat kerjasama, dan faktor pendorong dilakukannya kerjasama di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, investasi, dan lainnya.

Banyak juga penelitian yang membahas mengenai manfaat suatu daerah menjalin kerjasama *Sister province* pada bidang ekonomi, teknologi, pertanian, pariwisata, olahraga, pariwisata, pendidikan, dan lain sebagainya. Penelitian lain meneliti tentang potensi yang dapat dikembangkan dari suatu daerah melalui kerjasama dan menganalisis alasan mengapa ada yang menjalankan kerjasama ada yang tidak. Serta, adanya penelitian tentang identifikasi kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan paradiplomasi di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian tersebut sudah banyak membahas mengenai efektivitas implementasi, potensi yang dapat dikembangkan, faktor utama kegagalan dan faktor pendorong kerjasama yang semuanya berorientasi pada keuntungan ekonomi secara materiil saja seperti di bidang pariwisata, perdagangan, investasi, pertanian, peternakan, seni dan budaya, dan pengembangan daerah. Dimana dalam kerjasama bidang pariwisata bertujuan untuk menarik wisatawan untuk datang maka akan mendatangkan keuntungan berupa meningkatnya perekonomian. Dalam kerjasama bidang perdagangan dan investasi menitik beratkan pada kegiatan ekspor dan impor

dengan komoditi garmen, furnitur meubel, dan vulkanisir (jatengdaily.com, 2020). Untuk kerjasama bidang pertanian dan peternakan lebih sering melakukan ekspor dan impor daging sapi dan sayur-sayuran, tukar pengalaman dan alih teknologi dalam bercocok tanam, dan untuk kerjasama bidang seni dan budaya merupakan kerjasama untuk dijadikan batu loncatan, mendapatkan pasar agar lebih dikenal di dalam negeri dan negara mitra.

Terdapat penelitian mengenai evaluasi hubungan kerjasama *Sister province* dalam bidang pendidikan, dimana lebih banyak membahas mengenai kerjasama pertukaran pelajar dan guru sekolah mengenai pertukaran pengenalan budaya Jawa dan bahasa Indonesia ke negara mitra kerjasama *Sister province* dan juga dari kerjasama pendidikan ini munculah kerjasama *sister school* antar sekolah ataupun perguruan tinggi. Tujuan dari kerjasama *Sister province* lebih merujuk kepada bidang pengenalan budaya dan bahasa kemancanegara, kerjasama dalam bidang pendidikan ini berjalan efektif karena seluruh kerjasama dijalankan sampai akhir. Dari hasil penelitian terdahulu diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang efektivitas implementasi kerjasama *Sister province* untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi. Kerjasama *Sister province* melalui pendidikan vokasi merupakan hal baru dilakukan karena masih minimnya atau jarang membahas kearah yang spesifik pendidikan secara praktis.

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan**

Untuk mengetahui efektivitas pencapaian tujuan kerjasama *Sister province* Jawa Tengah dengan Queensland dalam mengembangkan SDM melalui pendidikan

vokasi dimana pendidikan vokasi dipandang mampu menghasilkan SDM yang unggul dan berdaya saing.

#### **1.4.1.1. Manfaat Akademis**

Memberikan pengetahuan berupa kebaruan dalam bidang studi hubungan internasional khususnya mengenai implementasi kerjasama *Sister province* antara provinsi Jawa Tengah dengan Queensland berupa program kerjasama pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi.

#### **1.4.1.2. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai panduan bagi pemerintah di Indonesia untuk membuat kebijakan berkaitan dengan kerjasama selanjutnya, baik itu kerjasama *sister city/province* dalam berbagai bidang.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Berangkat dari penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus membahas mengenai efektivitas implementasi kerjasama *Sister province* Jawa Tengah-Queensland untuk mengembangkan SDM melalui pendidikan vokasi. Adapun penelitian ini menggunakan beberapa konsep yaitu paradiplomasi sebagai alat analisis aktor dan *Sister province* sebagai salah satu bentuk paradiplomasi dalam kerjasama internasional. Selain itu juga menggunakan teori faktor pendorong efektivitas implementasi program sebagai alat analisis untuk mengetahui efektivitas dalam program *Sister province*. Konsep diuraikan sebagai berikut:

### **1.5.1. Paradiplomasi**

Konsep paradiplomasi pertama kali di kemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Panayotis Soldatos (1991) dimana paradiplomasi merupakan gabungan dari istilah “diplomasi pararel” menjadi “paradiplomasi”. Istilah ini mengacu pada makna “politik luar negeri pemerintah pusat”. Paradiplomasi menurut Mukti (2020, hal. 1), merupakan suatu bentuk relasi luar negeri dengan mancanegara yang diupayakan oleh pemerintah daerah. Paradiplomasi ini merupakan aktivitas baru dalam kajian hubungan internasional yang mana umumnya kerjasama atau hubungan dengan negara lain dilakukan oleh pemerintah pusat suatu negara.

Keikutsertaan pemerintah daerah di kancah internasional menunjukkan bahwa konsep kedaulatan telah mengalami pergeseran. Pergeseran yang dimaksud adalah konsepsi kedaulatan terpusat atau sentralisasi menjadi konsep desentralisasi melalui otonomi daerah. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dipercaya bisa meningkatkan pelayanan masyarakat secara maksimal. Peningkatan ini dapat tercapai karena pemerintah daerah merupakan aktor yang paling mengetahui daerahnya secara pasti (Kuznetsov, 2015, hal. 22-24). Melalui desentralisasi, pemerintah dapat mewujudkan kepentingan dan mengembangkan daerah secara internasional tetapi masih menyesuaikan kepentingan nasional, membagi biaya pembangunan dan mempersatukan sumber daya dan kekuatan dalam hubungan yang dijalin dengan pihak asing (Soldatos, 1990).

Praktek paradiplomasi yang dilakukan pemerintah daerah dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok yaitu, (Lecours, 2008) Lapisan pertama, merupakan hubungan atau kerjasama hanya berada dalam lingkup masalah ekonomi seperti

menarik pasar, memperbanyak jumlah investor, memperluas pasar ekspor, dalam lapisan ini tidak ada kerjasama budaya atau politik. Lapisan kedua, kerjasama yang terjalin di lebih banyak sektor tidak hanya satu sektor saja tetapi terdiri dari banyak sektor seperti budaya, pendidikan, teknologi, dan lainnya. Lapisan ketiga, dimana lapisan ini merupakan lapisan dimana pemerintah sub-state melakukan kerjasama yang dapat mendukung perbedaan otonomi politik, perbedaan budaya, dan karakter komunitas.

Berdasarkan cakupan dalam paradiplomasi, terbagi tiga tipe paradiplomasi yaitu transborder paradiplomasi, global paradiplomacy, dan regional paradiplomacy. Pada penelitian ini, kerjasama yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah dengan Queensland termasuk kedalam tipe global paradiplomacy mengingat hubungan diplomasi dilakukan antara dua provinsi tersebut berasal dari negara berbeda. Provinsi Jawa Tengah berasal dari Republik Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara, sementara Queensland berasal dari Australia yang berada di kawasan Selatan Benua Asia.

Bentuk kegiatan paradiplomasi yang dilaksanakan oleh pemda pada penelitian ini adalah *Sister province*. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan bentuk kerjasama *Sister province* yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Tengah dengan Queensland sebagai fokus penelitian, terlihat dengan adanya program-program kegiatan yang melibatkan perwakilan dari masing-masing provinsi. Bentuk kerjasama *Sister province* adalah salah satu bentuk dari kegiatan paradiplomasi yang dilaksanakan oleh pemda. Kerjasama yang terjalin antara Jawa Tengah dengan Queensland dapat dikatakan sebagai kerjasama yang aktif. Akan tetapi dalam

perjalanannya, pelaksanaan program kerjasama ini tidak selalu berjalan dengan lancar.

Teori ini digunakan penulis untuk menanalisa tugas dari pemerintah daerah sebagai actor sub-negara yang mampu melakukan kerjasama dengan pihak asing untuk memenuhi keperluan masyarakat. Dalam kerangka konsep yang direncanakan bahwa paradiplomasi sebagai salah satu bentuk diplomasi yang mengikutserakan actor pemerintah daerah dapat dilaksanakan melalui kerjasama antar provinsi yaitu *Sister province*. Karena itu, penelitian ini memiliki maksud untuk mengetahui kerjasama *Sister province* antara Jawa Tengah dan Queensland berjalan efektif atau tidak. Sehingga, pada penelitian ini untuk mengetahui lancar atau tidaknya kerjasama yang terjalin, digunakan indicator keberhasilan paradiplomasi untuk menjadi panduan.

Dalam bukunya *city to city network: Asian Perspective on Key elements and areas for success*, Tjandradewi dan Marcotullio (2009 ) menjelaskan bahwa terdapat beberapa indicator keberhasilan dalam melaksanakan paradiplomasi yang berpengaruh terhadap efektivitas hubungan paradiplomasi yaitu pertama, komitmen kedua pihak, komitmen yang dimaksudkan mengarah pada komitmen yang terjalin oleh kedua belah pihak negara untuk saling berhubungan. Adanya komitmen inilah yang mendorong pemerintah daerah aktif berkomunikasi untuk melakukan pembangunan daerah secara langsung agar sesuai dengan permasalahan yang ada. Kedua, keterlibatan masyarakat dalam mendukung program kegiatan implementasi. Melalui keterlibatan masyarakat dalam implementasi kerjasama *Sister province* dapat terlihat dari bagaimana komunitas dan masyarakat Jawa Tengah bekerjasama

dengan pemerintah daerah. Ketiga, terdapat nota kesepakatan antar kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan kerjasama paradiplomasi diperlukan adanya kesepakatan hukum yang mengikat untuk menghindari adanya kendala pada kerjasama, adanya perselisihan antar kedua pihak, adanya pemberhentian kerjasama, dan lain-lain. Terdapatnya nota kesepakatan pada hubungan kerjasama menandakan pemerintah daerah siap terjun dalam hubungan internasional. Keempat, terdapat hubungan timbal balik yang sama antar kedua pihak. Terjalinya kerjasama internasional yang berkonsepkan provinsi bersaudara membuat masing-masing pihak memiliki kedudukan dan peranan yang sama dalam menjalankan kerjasama dan dalam mendapatkan keuntungan. Hal inilah yang membuat hubungan kerjasama kota/provinsi bersaudara diminati. Kelima, memiliki peluang yang dapat diraih dari kegiatan atau program yang dilaksanakan. Dari beberapa bidang yang disepakati dalam kerjasama harus memiliki hasil yang didapatkan atau dirasakan karena dapat berpengaruh dalam kepentingan kedua belah pihak dan juga berpengaruh pada keberlanjutan hubungan kerjasama.

### **1.5.2. Konsep Sister City/Province**

Salah satu bentuk Paradiplomasi atau keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional adalah *Sister province*. Merupakan konsep untuk membangun kerjasama antar dua kota atau provinsi dari satu negara dengan negara lain berdasarkan adanya kemiripan karakteristik secara geografis, budaya, dan politik yang berguna bagi peningkatan pembangunan bagi daerah dan saling menguntungkan (Prameswari, 2020). Sependapat dengan definisi tersebut (Ziegler, 2017) Sister city/province berfokus pada persaudaraan, hubungan persahabatan dan

persaudaraan yang terjalin dalam kerjasama antar kota atau provinsi diharapkan dapat terjalin selamanya, saling menjaga, melindungi, membantu, saling belajar satu sama lain dalam berbagai hal seperti saudara sendiri. Tidak hanya pemerintah daerah saja yang terlibat dalam kerjasama *Sister province* antar negara. Villiers (2007 , hal. 2) menyatakan bahwa konsep sister itu sendiri juga terkait dengan keterlibatan seluruh masyarakat sipil, komunitas bisnis, komunitas pendidikan, komunitas sosial dan budaya.

Dalam melakukan kerjasama *Sister city/province* memiliki manfaat yang didapatkan, seperti saling berbagi atau transfer ilmu dan pengalaman dalam bidang-bidang kerjasama yang dijalin, mempererat persahabatan antar masyarakat kedua kota/provinsi, serta memicu pemerintahan daerah untuk berinovasi dan berperan aktif dalam membangun daerahnya (Nuralam, 2018 ). Kerjasama *Sister province* adalah perjanjian formal dengan waktu pelaksanaan yang lama antara pemerintah provinsi disuatu negara dengan provinsi lainnya di negara lain dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama secara formal berupa *Memorandum of Understanding* (MoU), Lol, dan nota kesepakatan yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat dan DPRD setempat. Terdapat tiga sifat dari *Sister province* yaitu, associate dimana berfokus pada pertukaran budaya dan peduli terhadap isu internasional. Reciproactive, adanya perkembangan sistem pertukaran pada bidang pendidikan. Dan commercial, pengambilan keuntungan dari kedua proses sebelumnya untuk meningkatkan ekonomi (Sudirman, 2020). Ketiga sifat tersebut dapat apat mengidentifikasi sebuah *Sister province*.

### 1.5.3. Efektivitas Program Implementasi

Adapun penelitian ini menggunakan analisis factor pendorong efektivitas sebagai alat untuk menganalisis efektif atau tidaknya dari program kerjasama *Sister province*. Efektivitas adalah komponen yang digunakan untuk memperoleh keinginan yang sudah ditetapkan pada setiap program yang akan dilaksanakan (Kurbani, 2021). Efektivitas adalah alat untuk mengukur terlaksananya tujuan yang sudah di tentukan sebelumnya (Handayani, 1994, p. 16). Menurut (Burches, 2020) efektivitas adalah suatu kekuatan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Jadi, efektivitas adalah suatu ukuran untuk membuktikan pencapaian dalam mencapai tujuan atau sasaran dalam setiap program suatu organisasi. Untuk mengukur efektivitas program, implementasi kerjasama *Sister province* maka dapat menggunakan indicator (Buis, 2009), yaitu:

- a. Open discussion, merupakan proses diskusi antar dua belah pihak terkait untuk membahas kerjasama yang akan dilaksanakan.
- b. Analysis of the problem, dimana sebelum menetapkan suatu program untuk menyelesaikan masalah perlunya adanya analisis terlebih dahulu.
- c. Agreement upon strategi, menentukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah melalui pelaksanaan program yang selaras dengan yang dibutuhkan oleh target.
- d. Regular contact, merupakan pemberitahuan seluruh kegiatan program yang akan dilaksanakan kepada seluruh pihak terkait mulai dari awal pelaksanaan sampai akhir

- e. Clear purpose and result, merupakan upaya untuk mencari tahu apakah setelah program selesai dilaksanakan, hasil yang didapatkan sesuai dengan tujuan atau tidak.
- f. Monitoring and evaluation, adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pelatihan.

## **1.6. Argumen Penelitian**

Dari rumusan masalah dan kerangka teori paradiplomasi dan implementasi kebijakan menggunakan indikator diatas, maka hipotesis penulis mengenai bagaimana efektivitas kerjasama *Sister province* dan pengaruhnya dalam meningkatkan SDM, yang mana dalam hal ini dilakukan melalui pendidikan vokasi melalui kerjasama *Sister province* Jawa Tengah dan Queensland adalah implementasi program kerjasama Sister Province antara Jawa Tengah dengan Queensland dapat dikatakan tidak efektif. Dikatakan tidak efektif jika implementasi dikarenakan adanya perbedaan budaya mengajar dan adanya kendala pada bahasa. Hal itu mengakibatkan kerjasama ini tidak efektif dalam meningkatkan kualitas SDM karena para guru di sekolah tidak mau menerapkan hasil pelatihan yang telah didapatkan.

### **1.6.1. Definisi Konseptual**

#### **1.6.1.1. Paradiplomasi**

Secara umum, paradiplomasi adalah bentuk jalinan kerjasama luar negeri yang terjalin antara pemda suatu negara dengan pihak asing. Untuk mengembangkan dan mencari solusi atas masalah yang ada pemerintah daerah dapat menggunakan paradiplomasi sebagai alat untuk melakukan aktivitas internasional salah satunya

dengan melakukan kerjasama dengan negara lain. Penelitian ini akan menganalisis secara khusus mengenai jalinan paradiplomasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Indonesia dan Queensland di Australia.

#### **1.6.1.2. Konsep Sister City/Province**

Secara umum, *Sister province* adalah bentuk dari hubungan luar negeri yang diusahakan oleh pemda di suatu negara dengan pemerintah daerah di negara lain yang mempunyai kemiripan karakteristik sekaligus perbedaan seperti luas wilayah, karakteristik sosio-kultural, dan permasalahan yang dihadapi dengan tujuan untuk membangun hubungan kerjasama yang dirancang untuk membentuk kerjasama di seluruh kota maupun provinsi, mengenalkan kebudayaan, meningkatkan ekonomi, dan mendorong perkembangan dalam berbagai hal. Pada penelitian ini, akan digunakan konsep paradiplomasi yaitu *Sister province* karena sesuai dengan topik yang akan dibahas.

#### **1.6.1.3. Efektivitas Program**

Efektivitas program berhubungan dengan sejauh mana implementasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan program. Efektivitas adalah suatu kekuatan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan (Magnus Wilson K. W., 2018). Dalam penelitian ini, program pelatihan guru atau pengajar vokasi atau SMK di Jawa Tengah melalui kerjasama *Sister province* antara Provinsi Jawa Tengah dengan Queensland yang diidentifikasi dengan kebijakan yang telah dibentuk berupa sebuah program untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Jawa Tengah. Dalam menganalisis pelaksanaan program kerjasama *Sister province* digunakan

untuk menganalisis keefektifan program, pelaksanaan kerjasama *Sister province* digunakan indicator efektivitas Hans Buis.

## **1.6.2. Definisi Operasional**

### **1.6.2.1. Paradiplomasi**

Pemerintah non-negara dalam melaksanakan paradiplomasi atau aktivitas hubungan luar negeri pada penelitian ini dilakukan dengan cara kerjasama *Sister province*. Praktek paradiplomasi yang dilakukan pemerintah daerah dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok yaitu (Lecours, 2008) pertama, hubungan dan kerjasama hanya berada dalam lingkup masalah ekonomi seperti menarik pasar asing untuk masuk, memperbanyak jumlah investor, memperluas pasar lewat ekspor baru, dalam lapisan ini tidak ada kerjasama mengarah kearah budaya atau politik. Kedua, dimana tidak hanya terbatas pada satu sector saja tetapi terdiri dari banyak sector seperti budaya, pendidikan, teknologi, dan lainnya. Ketiga, dimana dalam lapisan ini memiliki tujuan politik suatu negara, dimana pemerintah subnasional mencoba mewujudkan kerjasama antar negara bagian yang dapat mendukung perbedaan otonomi politik, perbedaan budaya, dan karakter dari komunitas. Sedangkan, indicator keberhasilan paradiplomasi yaitu kedua pihak memiliki komitmen untuk saling berhubungan, partisipasi dari komunitas dan stakeholder terkait, terdapat nota kesepahaman antar kedua pihak, terdapat hubungan timbal balik yang sama antar kedua pihak, dan memiliki peluang yang dapat diraih atau hasil yang didapatkan dari pelaksanaan program.

### 1.6.2.2. Analisis Efektivitas Program

Analisis efektivitas pelaksanaan program kerjasama sister province digunakan untuk mengetahui seberapa efektif dan berhasil implementasi program pelatihan ITAC untuk dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi guru mengajar dalam kerjasama *Sister province*. Efektivitas implementasi program adalah penentuan terhadap tercapai atau tidaknya misi program yang telah dibuat sebelumnya. Efektivitas program berhubungan dengan sejauh mana implementasi yang dilaksanakan. Pada penelitian ini menggunakan indicator factor pendorong efektivitas sebagai panduan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program kerjasama Sister province. Dalam karyanya yang berjudul *The role of local government associations in increasing the effectiveness of city-to-city cooperation*, yang membahas mengenai efektivitas pemerintah daerah dalam menjalankan kerjasama antar kota. Terdapat enam hal yang harus dipenuhi dalam efektivitas yaitu, (Buis, 2009)

- a. Open discussion, merupakan proses diskusi antar dua belah pihak terkait untuk membahas kerjasama yang akan dilaksanakan
- b. Analysis of problem, dimana sebelum menetapkan suatu program untuk menyelesaikan masalah perlu adanya analisis terlebih dahulu
- c. Aggement upon strategi, menentukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah melalui pelaksanaan program yang selaras dengan yang dibutuhkan oleh target.

- d. Regular contact, merupakan pemberitahuan seluruh kegiatan program yang akan dilaksanakan kepada seluruh pihak terkait mulai dari awal pelaksanaan sampai akhir.
- e. Clear purpose and result, merupakan upaya untuk mencari tahu apakah setelah program selesai dilaksanakan, hasil yang didapatkan sesuai dengan tujuan atau tidak.
- f. Monitoring and evaluation, adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pelatihan.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan cara kualitatif deskriptif. Dimana penelitian deskriptif selalu menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi. Pada penelitian ini, penulis akan menggambarkan keefektifan implementasi program kerjasama Jawa Tengah dengan Queensland salah satunya dalam bidang pendidikan vokasi yang telah disepakati dalam MoU, melalui program yang telah diinisiasi.

### **1.7.2. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian penulis dengan berdasarkan pada teori paradiplomasi dimana teori paradiplomasi merupakan dasar dari kerjasama *Sister City/Sister Province*. Kemudian menggunakan teori efektivitas program dalam menganalisis efektivitas program implementasi kerjasama *Sister Province* Provinsi Jawa Tengah dengan Queensland dalam meningkatkan SDM dengan fokus penelitian ini hanya pada bidang pendidikan vokasi tahun 2019-2021.

### **1.7.3. Situs Penelitian**

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti atau penulis mengamati keadaan objek untuk mendapatkan bahan maupun data-data yang dibutuhkan dalam melakukan analisis. Terkait penelitian tersebut, maka penulis menetapkan bahwa situs penelitiannya berada di Indonesia yang lebih tepatnya penulis berada di Kota Semarang sebagai tempat untuk meneliti skipsi ini.

### **1.7.4. Subjek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan subjek yang dijadikan sebagai sampel atau objek yang diteliti adalah kerjasama *Sister province* antara Jawa Tengah dengan Queensland. Dalam penelitian ini secara khusus berfokus pada efektivitas program implementasi kerjasama Provinsi Jawa Tengah dengan Queensland yang salah satu pengembangannya adalah pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi Tahun 2019. Penelitian ini ditulis menggunakan teori paradiplomasi serta efektivitas program implementasi.

### **1.7.5. Jenis Data**

Penelitian ini memakai data sekunder dan data primer. Dalam data sekunder maka data diperoleh oleh peneliti dengan cara tidak langsung. Dan data sekunder ini dapat berupa buku-buku, teks berita, catatan, dokumen, bukti-bukti arsip yang berkaitan langsung dengan topik penelitian ini. Sedangkan data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dengan cara langsung dari wawancara dengan pihak-pihak pelaksana dan juga pihak-pihak terkait.

### 1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini memakai metode kualitatif sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi pustaka. Penulis mengumpulkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Teknik pengumpulan data kualitatif terbagi dalam dua jenis data (Sugiono, 2015) yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti pengumpulan data dan dokumen-dokumen. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung seperti wawancara.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder berupa kajian pustaka, sumber-sumber terpercaya seperti portal berita CNN.com, BBC.com yang digunakan untuk melihat pemberitaan terkait dengan kerjasama *Sister province* Jawa Tengah dengan Queensland, dan yang lainnya, jurnal artikel terkait, artikel penelitian sebelumnya yang didapatkan melalui Jurnal Universitas seperti E- Journal Undip, Jurnal UI, Jurnal UGM, dll lalu menggunakan jurnal-jurnal internasional seperti Research Gate, Cambridge Journal, Academia.edu, Journal Storage (JSTOR) dll.

Serta dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait kerjasama *Sister province* Provinsi Jawa Tengah dengan Queensland, wawancara tersebut dilakukan dengan :

1. Eka Augustine Wynnarningsih, SS, M.Hum. ( Kepala Bagian Otonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah)

2. Dr. Ernest Ceti Septiyanti, SE, M.Si. (Kepala Dinas Cabang XIII Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah)
3. Wihantina Rahayu, S.Pd, M.Pd. (Guru Tata boga SMKN 6 Semarang)
4. Laily Yunica Ariyanti, S.T. (Guru Mekantronika SMKN 7 Semarang)
5. Mohammad Yunan Setyawan, S.Pd. (Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana dan ketenagakerjaan SMKN 10 Semarang)
6. Guntur Darmawan, S.Pd. (Waka Kurikulum dan guru SMKN 11 Semarang)

#### **1.7.7. Analisis Data dan Interpretasi Data**

Dalam analisis data kualitatif, metode analisis data yang mendalam dari hasil pengamatan, studi literatur, dan wawancara bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pola, tema, hubungan, hipotesa, dan lain-lain agar dapat ditarik kesimpulan secara tentatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kongruen. Dalam teknik analisis kongruen maka harus terdapat kesesuaian antar teori yang relevan dengan konsep yang akan diteliti. Dengan menggunakan proses pelacakan dalam teknik analisis kongruen akan membantu melacak peristiwa untuk menggali hubungan kausal ke hasil yang merata. Proses teknik analisis kongruen ini juga menggunakan kekuatan pejelasan dari berbagai tinjauan teoritis. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori paradiplomasi untuk meneliti kerjasama *Sister province* serta menggunakan teori efektivitas implemmentasi kebijakan untuk meneliti sejauh mana keefektifan kerjasama program yang di laksanakan yang dilihat dari budaya sekolah di masing-masing guru sekolah SMK yang mengikuti pelatihan program.

### **1.7.8. Kualitas Data**

Pengujian kualitas data dilaksanakan untuk memastikan penelitian yang dilakukan betul-betul penelitian ilmiah selain itu juga untuk menguji data yang diperoleh. Penulis dalam mengumpulkan data dalam bentuk kajian teoritis dan artikel jurnal – jurnal ilmiah menggunakan jurnal artikel yang berasal dari jurnal internasional maupun nasional yang terakreditasi SCOPUS dan dikti SINTA seperti jurnal universitas yaitu E-Jurnal Undip, Jurnal UGM, Jurnal UI dll lalu menggunakan jurnal-jurnal internasional seperti Resarch Gate, Cambridge Journal, Academia.edu, Journal Storage (JSTOR), serta wawancara. Hal tersebut untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan oleh penulis adalah sumber akurat dan terpercaya karena telah melewati hasil yang sudah teruji kredibilitasnya.